

SINERGI PEMERINTAH BUMDES DAN MASYARAKAT: STRATEGI PENGUATAN KELEMBAGAAN UNTUK DESA BERKELANJUTAN

Windi Puspitasari¹, Muhammad Firdaus Reza², Junita Purba³, Ulfa⁴, Meiman Rius
Gea⁵, Kelly⁶

puspitasariwindy37@gmail.com¹, mfirdausreza196@gmail.com², junitapurba14@gmail.com³,
ulfaulfaulfa72@gmail.com⁴, meimanriusgea55@gmail.com⁵, kellyaksa31@gmail.com⁶

Universitas Palangka Raya

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi penguatan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam konteks pembangunan desa berkelanjutan. Fokus utama diarahkan pada sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pengelola BUMDes dalam menciptakan tata kelola yang efektif, transparan, dan akuntabel. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi literatur, berdasarkan kajian jurnal, buku, regulasi, dan laporan penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan BUMDes mampu meningkatkan ketahanan ekonomi desa, menciptakan kemandirian, dan memperkuat modal sosial. Sinergi multipihak antara pemerintah sebagai regulator dan fasilitator, BUMDes sebagai agen ekonomi desa, serta masyarakat sebagai partisipan aktif menjadi strategi kunci untuk mewujudkan desa yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: BUMDes, Pemerintah Desa, Masyarakat, Kelembagaan, Pembangunan Berkelanjutan.

ABSTRACT

This study aims to analyze institutional strengthening strategies of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in the context of sustainable village development. The main focus is on the synergy among government, community, and BUMDes managers in creating effective, transparent, and accountable governance. The research method employed is qualitative with a literature review approach, based on journals, books, regulations, and previous research reports. The findings reveal that institutional strengthening of BUMDes enhances village economic resilience, fosters independence, and strengthens social capital. The synergy among the government as regulator and facilitator, BUMDes as the village's economic agent, and the community as active participants is a key strategy in realizing inclusive, competitive, and sustainable villages.

Keywords: BUMDes, Local Government, Community, Institution, Sustainable Development.

PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan salah satu agenda prioritas nasional dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat secara merata. Hal ini sejalan dengan visi pembangunan Indonesia yang menempatkan desa sebagai garda terdepan dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan landasan hukum yang kuat bagi desa untuk mengelola potensi yang dimiliki secara mandiri, dengan prinsip partisipasi, pemberdayaan, dan kemandirian. Salah satu instrumen penting dalam upaya tersebut adalah pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berfungsi sebagai motor penggerak perekonomian desa melalui pengelolaan potensi sumber daya lokal, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan pendapatan masyarakat.

Menurut Sutoro Eko (2018), BUMDes bukan sekadar lembaga bisnis, melainkan juga sarana membangun kemandirian desa yang berlandaskan modal sosial. BUMDes menjadi wadah demokratisasi ekonomi desa yang melibatkan masyarakat secara langsung

dalam proses pengambilan keputusan maupun pengelolaan usaha. Sementara itu, Hermanto (2020) menegaskan bahwa keberhasilan BUMDes sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola kelembagaan yang mencakup transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas manajerial.

Namun, implementasi BUMDes di berbagai daerah masih menghadapi tantangan serius. Permasalahan yang sering muncul meliputi lemahnya tata kelola kelembagaan, keterbatasan modal usaha, rendahnya kapasitas sumber daya manusia dalam hal manajerial maupun kewirausahaan, serta minimnya partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan usaha desa. Menurut Yustika (2019), BUMDes kerap gagal berkembang karena pola pengelolaannya masih bercorak administratif dan belum sepenuhnya mengadopsi prinsip-prinsip tata kelola korporasi modern.

Selain itu, keberadaan BUMDes seringkali dihadapkan pada problematika koordinasi antara pemerintah desa, pemerintah daerah, serta lembaga pendamping yang seharusnya bersinergi dalam memberikan dukungan kebijakan maupun teknis. Di beberapa kasus, BUMDes juga kurang adaptif terhadap perubahan pasar dan perkembangan teknologi digital, sehingga berpotensi menghambat daya saing usaha yang dikelola. Tantangan lain adalah rendahnya tingkat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan, yang dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap BUMDes.

Mengingat kompleksitas permasalahan tersebut, diperlukan strategi penguatan kelembagaan BUMDes yang menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pengelola BUMDes. Pemerintah berperan sebagai fasilitator melalui kebijakan, regulasi, dan pendampingan; masyarakat sebagai subjek pembangunan berperan dalam partisipasi, pengawasan, serta dukungan sosial; sedangkan BUMDes sebagai lembaga ekonomi lokal bertugas mengoptimalkan potensi dan menciptakan nilai tambah ekonomi. Sejalan dengan pendapat Putri & Wulandari (2021), pembangunan desa yang berkelanjutan hanya dapat dicapai melalui kolaborasi multipihak, di mana pemerintah memberikan regulasi dan dukungan, sementara masyarakat menjadi aktor utama dalam mendorong keberhasilan BUMDes.

Dengan sinergi yang kuat, BUMDes tidak hanya dapat memperkuat struktur ekonomi desa, tetapi juga mampu membangun desa yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi penguatan kelembagaan BUMDes dalam konteks pembangunan desa berkelanjutan. Fokus utamanya adalah menganalisis bagaimana peran pemerintah, masyarakat, dan BUMDes dapat bersinergi dalam menciptakan tata kelola kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat desa.

KAJIAN PUSTAKA

Konsep Dasar Berkelanjutan

Menurut Todaro & Smith (2020), pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan generasi mendatang. Dalam konteks desa, hal ini berarti menjaga keseimbangan antara pemanfaatan potensi ekonomi lokal, pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan sosial masyarakat. Chambers & Conway (1992) menyebutkan bahwa desa berkelanjutan harus mampu menciptakan strategi penghidupan yang tangguh (*sustainable livelihoods*), sehingga masyarakat dapat beradaptasi dengan perubahan sosial, ekonomi, maupun lingkungan.

Selain itu, Sachs (2015) menegaskan empat dimensi utama desa berkelanjutan, yaitu: (1) ekonomi, melalui peningkatan pendapatan masyarakat; (2) sosial, dengan kesetaraan dan partisipasi; (3) lingkungan, dengan menjaga kelestarian alam; dan (4) kelembagaan, melalui tata kelola yang transparan. Di Indonesia, konsep ini diwujudkan dalam SDGs

Desa oleh Kemendes PDTT yang menekankan desa tanpa kemiskinan, desa sehat, peduli lingkungan, dan tanggap perubahan iklim. Dengan demikian, desa berkelanjutan adalah desa yang inklusif, mandiri, serta berbasis pada potensi dan kearifan lokal.

BUMDes Sebagai Instrumen Pembangunan Desa

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga ekonomi desa yang dibentuk melalui musyawarah desa dan dikelola secara bersama oleh pemerintah desa dan masyarakat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa BUMDes berfungsi sebagai instrumen pembangunan ekonomi desa yang berlandaskan gotong royong, partisipasi, dan kemandirian. Menurut Eko (2018), BUMDes tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada penciptaan nilai sosial, penguatan kelembagaan desa, serta distribusi manfaat yang adil. Sutrisno (2020) menambahkan bahwa BUMDes mampu mengintegrasikan potensi lokal dengan kebutuhan masyarakat, misalnya melalui usaha di sektor pertanian, jasa, keuangan mikro, maupun pariwisata.

Keberhasilan BUMDes sangat ditentukan oleh tata kelola kelembagaan yang baik, partisipasi masyarakat, dan dukungan pemerintah. Yustika (2019) menekankan bahwa BUMDes yang dikelola secara profesional dapat menjadi motor penggerak ekonomi desa, sedangkan kelemahan tata kelola justru menimbulkan konflik dan ketidakpercayaan. Dengan demikian, BUMDes berperan penting sebagai penghubung antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat desa, serta menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan kemandirian ekonomi dan pembangunan desa berkelanjutan.

Sinergi Pemerintahan dan Masyarakat

Sinergi antara pemerintah dan masyarakat merupakan kunci keberhasilan pembangunan desa. Pemerintah berperan sebagai regulator, fasilitator, dan penyedia sumber daya, sementara masyarakat menjadi pelaku utama melalui partisipasi aktif, gotong royong, dan pengelolaan potensi lokal. Menurut Cohen & Uphoff (1980), partisipasi masyarakat penting dalam setiap tahap pembangunan, mulai dari perencanaan hingga pengawasan. Putri & Wulandari (2021) menegaskan bahwa pembangunan desa berkelanjutan hanya dapat tercapai melalui kolaborasi multipihak yang saling mendukung. Dengan demikian, sinergi ini menciptakan collaborative governance yang mendorong terciptanya desa yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (library research). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman fenomena secara mendalam melalui interpretasi konsep dan teori yang relevan dengan penguatan kelembagaan BUMDes dalam konteks pembangunan desa berkelanjutan.

Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber sekunder, antara lain jurnal ilmiah, buku, peraturan perundang-undangan, laporan hasil penelitian terdahulu, serta dokumen resmi dari kementerian atau lembaga yang berhubungan dengan pembangunan desa dan pengelolaan BUMDes. Sumber-sumber tersebut dipilih secara purposif, yaitu hanya yang relevan dengan topik penelitian, memiliki kredibilitas, dan mutakhir (5–10 tahun terakhir), sehingga dapat memberikan gambaran yang valid dan akurat. Proses pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahap: (1) identifikasi literatur yang relevan menggunakan database ilmiah, (2) seleksi literatur berdasarkan kriteria inklusi seperti topik, tahun terbit, dan keterkaitan dengan kelembagaan desa, (3) pengorganisasian data ke dalam kategori tematik, dan (4) sintesis hasil bacaan untuk menemukan pola strategi penguatan kelembagaan BUMDes. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis). Analisis ini dilakukan dengan membaca, menafsirkan, dan mengklasifikasikan

isi literatur yang diperoleh untuk mengidentifikasi tema-tema utama terkait penguatan kelembagaan. Melalui analisis ini, peneliti dapat mengungkap pola hubungan antara peran pemerintah, BUMDes, dan masyarakat dalam menciptakan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan sintesis konseptual yang komprehensif, serta memberikan rekomendasi strategis bagi penguatan kelembagaan BUMDes sebagai instrumen pembangunan desa berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1 dibawah ini memaparkan terkait dengan hasil kajian library research terkait dengan “Sinergi Pemerintah, BUMDes, dan Masyarakat: Strategi Penguatan Kelembagaan Untuk Desa Berkelanjutan”, sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Analisis

No	Judul Kajian	Tujuan Penelitian	Hasil Analisis	Referensi
1	Penguatan Kelembagaan BUMDes dalam Mendorong Ekonomi Desa	Menganalisis peran kelembagaan BUMDes dalam meningkatkan perekonomian desa.	Penguatan kelembagaan meningkatkan akuntabilitas, transparansi, serta kepercayaan masyarakat sehingga BUMDes lebih efektif sebagai motor ekonomi desa.	Eko (2018)
2	BUMDes sebagai Instrumen Kemandirian Desa	Mengkaji kontribusi BUMDes dalam menciptakan kemandirian ekonomi desa.	BUMDes mampu menurunkan ketergantungan desa pada pihak eksternal melalui pengelolaan potensi lokal secara mandiri.	Yustika (2019)
3	Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat dalam Pengelolaan BUMDes	Menjelaskan pentingnya sinergi multipihak dalam pembangunan desa.	Kolaborasi pemerintah sebagai fasilitator dan masyarakat sebagai pelaku utama terbukti memperkuat keberlanjutan program BUMDes.	Putri & Wulandari (2021)
4	BUMDes dan Pembangunan Berkelanjutan	Mengkaji BUMDes sebagai instrumen pembangunan desa yang berorientasi jangka panjang.	BUMDes berkontribusi pada peningkatan ekonomi, pemberdayaan sosial, serta menjaga keberlanjutan lingkungan desa.	Sutrisno (2020)

Pemerintah memiliki peran strategis dalam memperkuat kelembagaan BUMDes. Sebagai regulator, pemerintah menyediakan landasan hukum, kebijakan, serta regulasi yang mendorong desa untuk mandiri dalam pengelolaan ekonomi. Selain itu, pemerintah juga berperan sebagai fasilitator melalui program pendampingan, pelatihan, serta pemberian akses permodalan seperti Dana Desa atau skema bantuan khusus pengembangan BUMDes. Menurut Yustika (2019), intervensi pemerintah yang tepat sasaran dapat memperkuat kapasitas BUMDes dalam menjalankan fungsinya, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini. Dengan demikian, pemerintah tidak hanya menciptakan aturan, tetapi juga menghadirkan ekosistem yang kondusif bagi tumbuh kembang BUMDes.

BUMDes tidak sekadar berfungsi sebagai badan usaha, melainkan juga sebagai agen pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal. Melalui BUMDes, desa memiliki ruang untuk mengelola potensi sumber daya lokal, menciptakan peluang usaha, serta menyalurkan keuntungan untuk kepentingan masyarakat. Penguatan kelembagaan BUMDes dapat

diwujudkan melalui penerapan prinsip transparansi tata kelola, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang manajemen dan kewirausahaan, serta diversifikasi usaha yang sesuai dengan potensi unggulan desa. Sebagaimana ditegaskan oleh Sutrisno (2020), BUMDes yang dikelola secara profesional dapat menjadi motor penggerak perekonomian desa sekaligus instrumen penguatan struktur sosial.

Keberhasilan BUMDes tidak dapat dilepaskan dari partisipasi masyarakat. Dukungan masyarakat dapat berupa kontribusi tenaga kerja, modal sosial, konsumsi produk lokal, hingga keterlibatan dalam pengawasan dan pengambilan keputusan. Menurut Cohen & Uphoff (1980), partisipasi masyarakat dalam pembangunan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi. Dalam konteks BUMDes, keterlibatan aktif masyarakat akan memperkuat legitimasi kelembagaan, meningkatkan rasa memiliki, serta menciptakan keberlanjutan usaha. Tanpa dukungan masyarakat, BUMDes berisiko kehilangan fungsinya sebagai lembaga ekonomi berbasis komunitas.

Sinergi antara pemerintah, BUMDes, dan masyarakat merupakan kunci untuk mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan. Pemerintah menghadirkan kebijakan dan dukungan, BUMDes menjadi pengelola sekaligus inovator ekonomi, sementara masyarakat berperan sebagai penggerak sekaligus penerima manfaat. Kolaborasi multipihak ini menciptakan ekosistem pembangunan yang holistik, mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sejalan dengan pendapat Putri & Wulandari (2021), pembangunan desa yang berkelanjutan hanya dapat dicapai apabila ada kolaborasi yang seimbang antara top-down policy dari pemerintah dan bottom-up initiatives dari masyarakat. Dengan demikian, sinergi ini tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat kemandirian dan kohesi sosial desa.

KESIMPULAN

Penguatan kelembagaan BUMDes merupakan strategi penting dalam mendorong pembangunan desa berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, BUMDes, dan masyarakat menjadi kunci terciptanya tata kelola yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Dengan dukungan regulasi, kapasitas manajerial, serta partisipasi aktif masyarakat, BUMDes dapat berfungsi sebagai motor penggerak ekonomi sekaligus instrumen pemberdayaan sosial.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur sehingga hasil analisis masih bersifat konseptual. Keterbatasan utama adalah kurangnya data empiris lapangan yang dapat memperkuat validitas temuan, khususnya mengenai variasi praktik pengelolaan BUMDes di berbagai daerah.

Saran

Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi lapangan dengan pendekatan kuantitatif maupun kualitatif mendalam pada beberapa BUMDes sebagai studi kasus. Pemerintah desa dan pengelola BUMDes juga perlu memperkuat kolaborasi, transparansi, serta inovasi usaha berbasis potensi lokal agar tercipta kemandirian desa yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Chambers, R., & Conway, G. (1992). Sustainable rural livelihoods: Practical concepts for the 21st century. IDS Discussion Paper 296. Institute of Development Studies.
- Cohen, J. M., & Uphoff, N. T. (1980). Participation's place in rural development: Seeking clarity through specificity. *World Development*, 8(3), 213–235. [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(80\)90082-8](https://doi.org/10.1016/0305-750X(80)90082-8)
- Eko, S. (2018). *Membangun kemandirian desa melalui BUMDes*. Yogyakarta: FPPD Press.
- Fadeli, Y. A. (2021). *Peran kelembagaan dalam menekan biaya transaksi pada pasar lokal di*

- Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Ekonomi Nusantara.
- Hermanto. (2020). Tata kelola kelembagaan BUMDes dalam pembangunan desa. *Jurnal Pembangunan Desa*, 5(2), 145–158.
- Putri, R., & Wulandari, S. (2021). Sinergi multipihak dalam pengelolaan BUMDes menuju desa berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 29(1), 55–68.
- Sachs, J. D. (2015). *The age of sustainable development*. New York: Columbia University Press.
- Sutrisno, H. (2020). BUMDes dan pembangunan berkelanjutan: Studi kasus desa wisata. *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan*, 12(1), 25–38.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic development* (13th ed.). Harlow: Pearson.
- Yustika, A. E. (2019). *Ekonomi kelembagaan dan BUMDes*. Malang: UB Press.